

**PENGEMBANGAN LKM GAPOKTAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

*Development Of Microfinance Institutions Gapoktan In The District Gunungkidul
Yogyakarta*

Oleh : Rika Nalinda

ABSTRACT

Research of development microfinance institutions (MFIs) Gapoktan in in the district of Gunung Kidul conducted from March to December 2014, aims to determine the factors that affect the sustainability of MFIs Gapoktan. The data used are primary data obtained from the Extension Workers, and MFIs Gapoktan. Secondary data from the Department of Agriculture, BP2KP and BPP. Sample MFIs Gapoktan. determined by purposive with a variety of conditions is less developed, undeveloped and developed worlds. Data were collected by interview and discussion. Analysis of data using multiple linear regression analysis. Factors that affect the sustainability of MFIs Gapoktan in Gunung consists of legality aspects, aspects of capability management, aspects of capital support, feasibility aspects, aspects of the characteristics of the MFI, and aspects of thereal guidance of the business. Results of the analysis showed that all six of these factors effect no significant effect on the development of MFIs Gapoktan in Gunung Kidul.

Keywords: development, microfinance institutions Gapoktan, performance

PENDAHULUAN

Pengembangan usaha mikro dan kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan mikro di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Fakta saat ini adalah sebagian lembaga keuangan mikro belum berbadan hukum sehingga diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangannya. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut tentang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) Gapoktan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Kabupaten Gunung Kidul memiliki 144 LKM Gapoktan yang mulai dibentuk secara resmi dan dibawah binaan Dinas Pertanian pada tahun 2009. Perkembangan ini cukup variatif, ada yang maju dan sudah berbadan hukum dan ada yang belum berkembang dan belum berbadan hukum. Berdasarkan Keputusan bersama 3 menteri dan Bank Indonesia (2009) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang belum berbadan hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat. Diantaranya dibentuk pada Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Dibentuknya LKM PUAP

untuk mengatasi problematika utama usaha tani di Indonesia pada masalah permodalan. Penyebab usaha tani sebagai usaha mikro tidak mampu mendapatkan akses modal dari perbankan karena pertimbangan “resiko” dan “biaya mahal”. Kecuali melalui *linkage* dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mampu menjembatani perbankan dengan usaha tani/mikro. Untuk itu perlu menumbuhkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang mampu melakukan fasilitasi “intermediasi” usaha Kelompok Tani (Poktan) dan Petani anggotanya dalam hal utama kendalanya adalah “permodalan”, dan bukan menyaingi usaha anggota, sehingga arah kegiatannya lebih kepada fungsi jasa keuangan./ Lembaga Keuangan Mikro (Unit Keuangan Mikro/LKM) yang profesional, mandiri dan mengakar di masyarakat. LKM Gapoktan melakukan pemilihan aktivitas usaha dengan berpegang pada 3 prinsip yaitu :berpihak pada rumah tangga petani (RTP)/usaha mikro, menguntungkan, dan berkelanjutan dengan ketentuan umum tersedianya modal tabungan dan aset (Purnomo,2013).

LKM Gapoktan dapat dikembangkan bersinergi dengan berbagai program pemerintah lainnya seperti: KEMENTERIAN Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Usaha Milik Negara dan lainnya *linkage*/Pembiayaan Perbankan dan sebagainya. LKM Gapoktan merupakan lembaga keuangan yang mendukung keberlangsungan Gapoktan (Sahyuti, 2007). Tujuan utama pembentukan dan penguatan Gapoktan adalah

untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas. Pembentukan Gapoktan didasari oleh visi yang diusung, bahwa pertanian modern tidak hanya identik dengan mesin pertanian yang modern tetapi perlu ada organisasi yang dicirikan dengan adanya organisasi ekonomi yang mampu menyentuh dan menggerakkan perekonomian di pedesaan melalui pertanian, di antaranya adalah dengan membentuk Gapoktan (Deptan, 2006).

Hendayana (2008), menyatakan bahwa karena yang dituju adalah LKM bagi petani, maka usaha yang dimaksudkan juga usaha pertanian. Adapun bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjaman/kredit dan penghimpunan dana masyarakat tani yang terkait dengan persyaratan pinjaman atau bentuk pembiayaan lainnya. LKM dibentuk, dari, oleh dan untuk kelompok tani yang akan berfungsi menyediakan akses keuangan kepada anggota baik dalam bentuk pinjaman, tabungan, modal, dan akses lainnya. LKM dikelola secara tersendiri (otonom) oleh anggota Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang dianggap berprestasi

Terdapat 7 (tujuh) prinsip yang harus dijadikan acuan ketika akan membangun LKM pertanian, yaitu :

1. Memenuhi prinsip kebutuhan, artinya LKM pertanian hanya perlu ditumbuh kembangkan di lokasi potensial yang petaninya memerlukan dukungan fasilitasi permodalan, dan belum ada lembaga jasa pelayanan keuangan di lokasi itu.

2. Harus fleksibel, dalam arti LKM yang ditumbuh kembangkan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.
3. Harus bersifat partisipatif. Penumbuhan LKM harus melibatkan par petani di lingkungan setempat, sehingga selain dapat mengakomodasi aspirasi petani, pengembangan yang dibangun secara partisipatif akan mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama.
4. Akomodatif, dalam hal ini LKM harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menjangkau kebutuhan petani dengan kelengkapan persyaratan minimal yang dimiliki petani.
5. Adanya penguatan. Artinya, meskipun pembentukan dan pengembangan LKM bertujuan menyediakan permodalan usaha tani, namun jangan sampai menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani.
6. Kemitraan. Dalam hal ini pembentukan dan pengembangan LKM dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi sektoral terkait dalam setiap kegiatan.
7. Keberlanjutan, penekanan keberlanjutan adalah pada kemampuan organisasi LKM

untuk tetap terus berjalan, meskipun sudah tidak ada campur tangan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta yang mendukungnya.

Menurut (Hendayana, 2008), keberhasilan penyelenggaraan LKM sektor pertanian akan sangat tergantung pada komitmen pengelola serta dukungan pembinaan. Pembinaan harus diagendakan dan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang kompeten di bidang LKM. Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun keberhasilannya masih bias pada usaha usaha ekonomi non pertanian. Skim perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari 10 % terhadap total plafon LKM. Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian terletak pada aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan *seed capital*, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani dan bimbingan teknis nasabah/pengguna jasa layanan LKM. Untuk memprakarsai penumbuhan dan pengembangan LKM pertanian diperlukan adanya pembinaan peningkatan kapabilitas bagi SDM calon pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan pendampingan teknis kepada nasabah pengguna kredit.

Syukur (2002) dalam Hendayana (2008),

menyatakan bahwa dampak keberhasilan dilihat dari beberapa perubahan dari sisi kelembagaan, indicator keberhasilan ditunjukkan oleh perkembangan jumlah peserta dan perkembangan aset serta dana yang terserap.

Hasil studi Holloh dan Prins (2006) dalam Hendayana dan Bustaman ,(2007), menunjukkan bahwa disamping ada LKM yang berhasil, ada pula yang kurang berhasil bahkan mandeg (stagnan). LKM yang pesat pertumbuhannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beroperasi di daerah perkotaan dan semi-perkotaan, LPD (Bali) dan BMT (terutama di Jawa Tengah & Jawa Timur). Sedangkan yang mengalami kemandegan misalnya keluarga LKM seperti LDKP (tidak termasuk LPD) dan BKD. Berbagai embrio LKM yang ditimbulkan proyek-proyek seperti UPK/D belum menunjukkan kemampuan untuk menghimpun simpanan dan menjalankan kegiatan operasional secara berkesinambungan karena terkait dengan aspek legalitas.

Fatma (2012), menyatakan bahwa evaluasi PUAP adalah untuk mengetahui sejauh mana tujuan PUAP tercapai berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum PUAP seperti : (1.) Indikator masukan (*input*) yaitu berbagai jenis sumber daya (faktor produksi) yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan. (2.) Indikator Proses. Proses (*Process*) yaitu kegiatan yang dilakukan supaya input dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan, meliputi penilaian kemampuan pengelola UKMA (manager dan

pembuku) dalam mengelola dana PUAP dan membukukan ke buku besar. Serta cara penyaluran dana PUAP ke petani / prosedur penyaluran dana PUAP. (3.) Indikator keluaran (*output*) yaitu bentuk produk yang dihasilkan secara langsung baik bersifat fisik maupun non fisik yang dapat dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan (4.) Indikator Keberhasilan PUAP hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan berfungsinya keluaran tersebut secara baik sehingga memberikan sumbangan terhadap proses pembangunan pada bidang terkait. (5.) Indikator Manfaat (*benefit*) dari Program PUAP. Manfaat (benefit) yaitu keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal. (6.) Indikator Dampak (*Impact*) dari Program PUAP. Dampak (*impact*) yaitu pengaruh positif maupun negatif yang muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan baik dalam bentuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin, dan lain lain.

LKM yang sudah berkembang beberapa tahun terakhir perlu dikaji perkembangan dan keberlanjutannya. Karena Program Pemerintah memberikan dana hibah PUAP kepada Gapoktan dan pengelolaannya oleh LKM. Permasalahannya adalah apakah LKM Gapoktan masih berjalan dengan baik dan lancar sampai saat ini. Apakah LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul ini semakin berkembang atau semakin menurun

kondisinya dan faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi LKM tersebut,

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul. Manfaatnya adalah untuk arah kebijakan pemerintah, dan untuk bahan informasi dalam pengembangan dan pemanfaatan LKM Gapoktan khususnya.

Kerangka pikir penelitian ini didasari dari LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul yang mempunyai tugas utama mengelola dana hibah PUAP yang digulirkan kepada anggota Kelompok tani yang bernaung dibawah Gapoktan. Sumber dana ini ada yang bertambah seiring dengan perkembangan LKM Gapoktan. Perkembangan Gapoktan berdasarkan informasi di lapangan ada yang berkembang, tidak berkembang dan kurang berkembang. Sejauh mana faktor faktor yang diduga mempengaruhi perkembangan LKM Gapoktan ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan Gapoktan menjadi kajian utama pada penelitian kali ini .. terdiri dari Aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan modal, kelayakan ekonomi usaha tani, karakteristik usahatani, dan aspek bimbingan teknis. Faktor faktor yang menyebabkan variasi yang akan dikaji dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan bulan Maret sampai Desember 2014 di Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode dasar penelitian ini adalah metode deskriptif. Penentuan sampel LKM dilakukan secara purposif di lima kecamatan dari 18 kecamatan di kabupaten Gunung Kidul. Masing Masing diwakili oleh 3 atau 4 LKM Gapoktan dengan asumsi memiliki variasi dari tingkat perkembangan saat ini. Jenis data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Data yang diambil meliputi data yang berkaitan dengan LKM Gapoktan. Pengambilan data primer dilakukan melalui Penyuluh dan pengurus LKM Gapoktan. Pengambilan data sekunder dilakukan di Dinas Pertanian, BP2KP, BPP.

Metode analisis data menggunakan metode analisis statistika deskriptif kualitatif dan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6$$

Keterangan:

Y = Pengembangan LKM Gapoktan

a = Konstanta ($X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

X1 = Aspek legalitas kelembagaan

X2 = Kapabilitas pengurus

X3 = Dukungan -modal

X4 = Kelayakan ekonomi usaha tani

X5 = Karakteristik usahatani

X6 = Bimbingan teknis

b.. = Nilai koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil LKM Gapoktan yang menjadi responden berasal dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Paliyan, Patuk, Playen, Semin dan

Tepus. LKM Harapan Jaya di Kecamatan Patuk adalah LKM yang tertua berdiri pada tahun 2006 bersamaan dengan berdirinya Gapoktan Harapan Jaya. LKM Sidoharjo di Kecamatan Tepus adalah LKM termuda yang berdiri pada tahun 2012. LKM ini berdiri 6 tahun setelah berdirinya Gapoktan Sidoharjo pada tahun 2006. Profil LKM Gapoktan yang menjadi responden dapat dilihat pada tabel 1.

Legalitas penyelenggaraan LKM terdiri dari adanya AD/ART, rencana kerja, terlaksananya RAT, sudah berbadan hukum, adanya Surat Keputusan yang menguatkan berdirinya LKM Gapoktan serta adanya kepengurusan. Gambaran aspek legalitas yang sudah dimiliki LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul terdapat pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 1. Profil LKM Gapoktan Responden di Kabupaten Gunung Kidul

No	Nama Gapoktan	Kecamatan Alamat	Nama LKM	Tahun Berdiri Gapoktan	Tahun Berdiri LKM
1	Harapan Jaya	Patuk	Harapan Jaya	2006	2006
2	Tani Makmur	Semin	Makmur	2007	2008
3	Sido Subur	Playen	Sido Subur	2006	2008
4	Gapoktan Tepus	Tepus	Gapoktan Tepus	2006	2009
5	Dadi Makmur	Semin	Dadi Makmur	2006	2009
6	Sido Subur	Playen	Sido Muncul	2003	2009
7	Sido Agung	Playen	Sido Agung	2009	2009
8	Sidomakmur	Paliyan	Pampang	2008	2010
9	Mulusan	Paliyan	Mulusan	2007	2010
10	Maju Makmur	Semin	Maju Makmur	2007	2010
11	Sedyo Makmur	Semin	Sedyo Makmur	2010	2010
12	Tani Manunggal	Patuk	Tani Manunggal	2009	2010
13	Purwodadi	Tepus	Purwodadi	2006	2011
14	Sidoluhur	Paliyan	Sidoluhur	2006	2011
15	Kumpul Makaryo	Patuk	Kumpul Makaryo	2007	2011
16	Sidoharjo	Tepus	Sidoharjo	2006	2012

Sumber : Data primer

Hasil kajian pengembangan LKM Gapoktan ditinjau dari aspek legalitas kelembagaan, aspek kapabilitas pengurus, aspek dukungan modal, aspek kelayakan ekonomi usahatani, aspek karakteristik usahatani dan aspek bimbingan teknis memperlihatkan variasi yang beragam.

Tabel 2. Legalitas Penyelenggaraan LKM Gapoktan Di Kabupaten Gunung Kidul

No.	Aspek Legalitas	Persentase
1	AD/ ART	100.00
2	Rencana Kerja	81.25
3	RAT	87.50
4	Badan Hukum	0
5	SK Pendirian LKM	25.00
6	Kepengurusan	50.00

Sumber : Olahan data primer

Semua LKM Gapoktan sudah memiliki AD/ART, 81,25% sudah memiliki rencana kerja sebagai acuan utama penyelenggaraan LKM. Baru 87,50 % LKM yang telah melaksanakan RAT. Surat keputusan berdirinya LKM Gapoktan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Pertanian baru 25% LKM yang sudah memilikinya. Untuk kepengurusan LKM yang berdiri sendiri berbeda dengan pengurus Gapoktan baru 50% LKM yang memilikinya.

Aspek kapabilitas pengurus LKM Gapoktan meliputi tingkat pendidikan pengurus, frekuensi pengurus mengikuti pendidikan dan hubungan pengalaman kerja pengurus dengan kegiatan di LKM. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.

kegiatan pengurus di LKM saat ini 37,5 % berhubungan, sebanyak 56,25% pengurus pengalaman kerjanya mempunyai hubungan sebahagian dan sebnyak 6,75% pengurus pengalaman kerjanya tidak ada hubungan dengan pekerjaan di LKM saat ini. Tidak ada hubungan pekerjaan sebelumnya dengan tugas LKM karena pengurus ini berasal dari tokoh masyarakat dan di percaya mampu mengelola LKM Gapoktan di daerahnya.

Pada tabel 4. menggambarkan modal yang dimiliki LKM Gapoktan yang terdiri dari jenis modal, bantuan dan pinjaman serta keswadayaan anggota. Modal LKM Gapoktan 100% berasal dari dana PUAP, dan 68% LKM sudah bertambah dengan adanya simpanan anggota, 18,75% LKM sudah mendapatkan pinjaman dari Bank, dan 12,50 % LKM sudah bekerja sama dengan pihak

Tabel 3. Kapabilitas Pengurus LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul.

Tingkat Pendidikan Pengurus	%	Frekuensi Pendidikan Non Formal Pengurus	%	Pengalaman Kerja dan Kegiatan Pengurus di LKM	%
Tamat SMA	75,00	1kali	43,75	Tdk ada hubungan Sebahagian	6,25
Perg.Tinggi	6,25	2 kali	25,00	berhubungan	56,25
Tamat S1	18,75	3 kali	25,00	Berhubungan	37,50
		4 kali	6,25		

Sumber : Olahan data primer

Tingkat pendidikan pengurus terbanyak adalah tamat SMA (75%). Dengan frekuensi mengikuti pendidikan non formal antara 1 sampai 4 kali. Frekuensi terbanyak adalah telah mengikuti pendidikan 1 kali (43,75%). Pengalaman kerja pengurus sebelum menjabat di LKM dengan

swasta dalam memupuk modal. Modal dari anggota selain iuran anggota juga didapat LKM dari keswadayaan anggota berupa modal penyertaan (18,75% LKM), bantuan tempat (37,50% LKM) dan bantuan peralatan kantor (12,50% LKM).

Tabel 4. Dukungan modal yang dimiliki LKM Gapoktan

Jenis Modal yang Dimiliki	%	Keswadayaan Non Iuran Anggota	%
PUAP	100,00	Tidak ada	43,75
Simpanan Anggota	68,75	Modal penyertaan anggota	18,75
Bank	18,75	Bantuan tempat	37,50
Swasta	12,50	Bantuan peralatan kaantor	12,50

Sumber : Olahan data primer

Perkembangan jumlah modal dan tingkat kemacetan pinjaman di LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada tabel5 . Jumlah modal awal yang berasal dari dana hibah PUAP adalah sebesar Rp.100.000.000,-. Yang saat ini sudah berkembang mencapai diatas Rp. 200.000.000,- ada pada 12,5% LKM. Tingkat kemacetan pinjaman terdapat pada lebih dari 50% LKM. Kemacetan terbanyak adalah dana dibawah Rp.10.000.000,- (62,50 % LKM). Sedangkan tingkat kemacetan dengan jumlah dana di atas

Rp.75.000.000 terdapat pada 6,24% LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul.. Dengan hasil ini tentu perlu ditelusuri lebih lanjut penyebab kemacetan ini.

Peminjam di LKM Gapoktan adalah anggota Gapoktan. Terdiri dari anggota kelompok tani yang ada di wilayah desa tersebut. Ada anggota kelompok yang belum memanfaatkan pinjaman di LKM Gapoktan ini. Gambaran jumlah peminjam di LKM Gapoktan terdapat pada tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Modal LKM Gapoktan, tingkat kemacetan dan banyaknya peminjam.

Jumlah Modal (X)		Tingkat Kemacetan(Z)		Jumlah Peminjam(Y)	
Rp	%	Rp	%	Orang	%
x< 100 juta	0	z<10 juta	62,50	y<50	18,75
100 juta<=x<125 juta	37,50	10juta<=z<25juta	18.75	50<=y<150	43,75
125 juta<=x<150 juta	43,75	25juta<=z<50juta	12.50	150<=y<250	31,25
150 juta<=x<175 juta	0	50juta<=z<75juta	0	y>=250	6,25
175 juta<=x<200 juta	6,25	z>=75juta	6.25		
200 juta<=x	12,50				

Sumber : Olahan data primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LKM diketahui bahwa jenis usaha yang sudah diselenggarakan LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul yang utama adalah usaha simpan pinjam. Saat ini sudah ada pengembangan usaha dengan berbagai usaha lainnya. Usaha lainnya yang sudah berkembang adalah usaha pembiayaan, pengolahan hasil, pengolahan pupuk organik dan perdagangan ternak.

Karakteristik LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul dapat dilihat pada tabel 6. Karakteristik LKM meliputi keterlibatan anggota dalam LKM, frekuensi rapat pengurus dan pengembangan peran LKM.

LKM wajib memiliki buku catatan administrasi sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Buku catatan administrasi yang sudah dimiliki LKM Gapoktan terdiri dari buku administrasi umum, buku administrasi keuangan dan buku inventarisasi. Masing masing bias dipecah lagi menjadi berbagai buku sesuai dengan variasi dari masing masing LKM. Buku yang sudah dimiliki semua LKM adalah buku

daftar anggota, buku pengurus, buku simpan pinjam.

Jumlah buku administrasi yang sudah dimiliki LKM Gapoktan di kabupaten Gunung Kidul yang terbanyak adalah 9 macam buku (6,25% LKM) yang paling sedikit adalah 3 macam buku (6,25% LKM). Persentase terbesar sebanyak 31,25% LKM memiliki 6 macam buku administrasi. (Tabel 7.)

Tabel 7. Jumlah buku administrasi yang dimiliki LKM Gapoktan

Jumlah macam buku yang dimiliki LKM	PERSENTASE
9 macam	6,25
8 macam	6,25
7 macam	12,50
6 macam	31,25
5 macam	25,00
4 macam	12,50
3 macam	6,25

Sumber : Olahan data primer

Tabel 6. Karakteristik LKM , keterlibatan anggota, rapat pengurus dan peran LKM .

Keterlibatan Anggota Dalam LKM		Rapat Pengurus per Tahun		Peran LKM Sebagai Lembaga	
orang	%	frekuensi	%		%
< 100	6,25	1-5 kali	5,00	Keuangan	100,00
100 ≤ x < 150	62,50	6-10 kali	12,50	Koperasi	31,25
150 ≤ x < 200	18,75	11-15 kali	25,00	Unit Usaha	12,50
200 ≤ x < 250	6,25	16 kali	6,25		
255 ≤ x < 300	6,25				

Sumber : Olahan data primer

Iuran anggota LKM terdiri dari iuran wajib dan iuran pokok. Iuran wajib anggota LKM berkisar antara Rp. 2.000,- (45,45%) Rp. 5.000,- (45,45%), Rp.10.000,-(9,09%). Sedangkan iuran pokok berkisar Rp. 1000 (9,09%),- sampai Rp.25000 ,-18,18%. Iuran pokok terbanyak adalah Rp.10.000,- (45,45%). Bunga pinjaman LKM bervariasi dari 0,9% (6,25%) sampai 1,5%(43,75%). Dengan lama pengembalian 10 bulan (37,5%) dan 12 bulan (56,75%).

pembimbing teknis. Pembimbing teknis LKM Gapoktan terdiri dari pembimbing perorangan dan pembimbing dari instansi atau lembaga. Pembimbing perorangan terdiri dari, pendamping LKM, pendamping PUAP dan penyuluh. Sedangkan pembimbing dari instansi atau lembaga terdiri dari BPP, Dinas Pertanian, BP2KP, dan BMT

Tabel 8. Iuran , bunga dan lama angsuran pinjaman LKM Gapoktan

Iuran Wajib		Iuran Pokok		Bunga		Lama Angsuran	
Rp.	%	Rp.	%	% bunga	%	frekuensi	%
2.000	45,45	1.000	9,09	0,09	6,25	10	37,50
5.000	45,46	5.000	9,09	0,10	37,50	12	56,25
10.000	9,09	10.000	45,45	0,12	12,50		
		25.000	18,18	0,15	43,75		
		20.000	9,09				

Sumber : Olahan data primer

Aspek bimbingan teknis pada tabel 9. meliputi pelatihan pengurus LKM dan frekuensi bimbingan yang diberikan kepada LKM oleh

Tabel 9. Pelatihan pengurus dan frekuensi bimbingan LKM Gapoktan

Pelatihan Pengurus		Frekuensi Bimbingan	
Kali	%	kali	%
1	37,50	1	25,00
2	31,25	2	50,00
3	18,75	3	6,25
5	12,50	4	18,75

Sumber : Olahan data primer

Pelatihan pengurus LKM menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan LKM. Sebanyak 37,75% pengurus LKM baru mengikuti 1 kali pelatihan. Yang telah mengikuti pelatihan 2 kali sebanyak 31,25% pengurus dan telah mengikuti pelatihan 3 kali 18,75%. Sebanyak 12,50% pengurus LKM telah mengikuti 5 kali pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. Tidak ditemukan pengurus yang sudah mengikuti pelatihan sebanyak 4 kali. Semua LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul telah mendapatkan bimbingan teknis. Frekuensi bimbingan teknis yang didapatkan berturut turut adalah 1kali (25% LKM), 2 kali (50% LKM), 3 kali (6,25% LKM)

dan 4 kali (18,75% LKM).

Deskripsi profil dan kondisi LKM Gapoktan dengan enam aspek yang dikaji memperlihatkan bahwa ke enam belas LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul memiliki variasi yang cukup beragam. Hal ini dapat dilihat dari dilihat dari pemaparan pada tabel yang ditampilkan diatas.

Hasil rekapan data pengembangan LKM Gapoktan yang akan dianalisis dengan analisis regresi berganda terdapat pada tabel 10. berikut ini.

Data diatas dianalisis menggunakan SPSS. Hasil analisis regresi berganda pengembangan LKM Gapoktan dapat dilihat pada tabel 11,

Tabel 10. Data regresi pengembangan LKM Gapoktan.

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
1	5	14	1	28,64	16	8	35
2	4	20	2	44,58	176	8	74
3	3	21	2	40,50	35	7	37
4	3	15	3	32,14	21	6	39
5	4	16	2	40,79	163	7	36
6	4	21	2	44,35	15	7	36
7	5	18	4	48,95	126	7	35
8	1	15	1	14,80	14	1	36
9	2	16	1	30,14	23	2	37
10	5	16	2	27,78	23	4	36
11	3	17	2	32,35	20	6	35
12	3	16	4	22,24	89	6	61
13	3	17	6	72,42	30	11	53
14	4	15	3	66,93	21	7	66
15	2	15	2	35,22	195	0	39
16	4	23	9	84,60	252	7	40

Sumber : Olahan data primer

Keterangan Variabel:

- X1 = Legalitas
- X2 = Kapabilitas Pengurus
- X3 = Dukungan Modal
- X4 = Kelayakan
- X5 = Karakteristik LKM
- X6 = Bimbingan Usaha
- Y = Faktor Pengembangan LKM

Tabel 11. Hasil analisis regresi berganda pengembangan LKM Gapoktan di Kabupaten Gunung Kidul.

Variabel	Koef. Regresi	t.hitung	Sig	Keterangan
Konstanta	53,334	2,008	,076	Tidak Signifikan
Bimbingan Usaha	-3,672	-,900	,391	Tidak Signifikan
Karakteristik LKM	-1,168	-,692	,506	Tidak Signifikan
Kapabilitas Pengurus	-1,663	-,546	,599	Tidak Signifikan
Legalitas	,164	,463	,655	Tidak Signifikan
Dukungan Modal	,058	,961	,362	Tidak Signifikan
Kelayakan	2,782	1,350	,210	Tidak Signifikan
R	0,515	F hitung	0,543	
R Square	0,266	Sig	0,765	
N	16			

Sumber : Olahan data primer

Nilai keeratan hubungan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen atau korelasi berganda (R) sebesar 0,515. Nilai keeratan hubungan / korelasi (R) tergolong sedang. Nilai kontribusi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi sebesar 0,266 atau sebesar 26,60% selebihnya atau 73,40% merupakan pengaruh variabel lain diluar variabel penelitian.

Nilai F hitung (0,543) lebih kecil dari nilai F tabel α 0,05., 6/9 (3,374) atau nilai probabilitas F hitung (dengan *software* SPSS) sebesar 0,765 lebih besar dari α yang ditetapkan sebesar 0,05. Sehingga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh tidak nyata terhadap faktor pengembangan LKM Gapoktan.

Dari output koefisien dapat disusun persamaan regresi pengembangan LKM Gapoktan. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = 53,334 - 3,672 X_1 - 1,168 X_2 - 1,663 X_3 + 0,164 X_4 + 0,058 X_5 + 2,782 X_6$$

Keterangan:

- Y = Pengembangan LKM Gapoktan
- a = Konstanta ($X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)
- X1 = Aspek legalitas kelembagaan
- X2 = Kapabilitas pengurus
- X3 = Dukungan modal
- X4 = Kelayakan ekonomi usaha tani
- X5 = Karakteristik usahatani
- X6 = Bimbingan teknis
- b1-6. = Nilai koefisien

Koefisien regresi aspek legalitas LKM, kapabilitas pengurus LKM, dukungan modal,

kelayakan ekonomi usahatani, karakteristik usahatani, bimbingan teknis secara bersama sama berpengaruh tidak nyata terhadap variabel Y karena nilai signifikansi lebih besar dari α yang ditetapkan sebesar 0,05

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bedasarkan hasil kajian, aspek legalitas, aspek kapabilitas pengurus, aspek dukungan modal, aspek kelayakan, aspek karakteristik LKM, dan aspek bimbingan usaha berpengaruh tidak nyata terhadap pengembangan LKM dalam berbagai variasi kondisi LKM Gapoktan yang dikaji di Kabupaten Gunung Kidul.

Saran

Pengkajian pengembangan LKM Gapoktan perlu dilanjutkan secara parsial dari masing masing aspek. Karena LKM merupakan lembaga pendanaan tingkat kemacetan tentu tidak dapat dihindari untuk itu perlu dikaji lebih lanjut tentang penyebab macetnya pengembalian pinjaman pada LKM Gapoktan. Dan perlu dukungan dan motivasi agar LKM lebih mandiri tidak tergantung dari program yang membesarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deptan 2006. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03/Pert/Hk.060/2/2006 Tentang Pedoman Pengujian Dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan*

*Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran
2006*

- Fatma,P., 2012. *Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diKabupaten Solok*, Artikel. Program Sudi Magister Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas.Padang.
- Hendayana,R. dan S. Bustaman, 2007. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor. <http://pse.litbang.deptan.go.id/>
- Hendayana. R., 2008. *Membangun Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Komunitas Petani*. Sinar Tani, 2 September 2008 www.litbang.deptan.go.id
- Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia nomor: 351.1/kmk.010/2009 ; nomor: 900-639a tahun 2009 ;nomor: 01/skb/m.kukm/ix/2009; nomor: 11/43a/kep.gbi/2009 *tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro*.
- Purnomo.W., 2013. *Konsep Dasar &Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) GAPOKTAN Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Diakses melalui elfazawa.blogspot.com/2013/.../konsep-dasar-organisasi-lembaga_767.ht... 16 Mei 2013
- Sahyuti., 2007. *Jangan Gegabah bikin-bikin GAPOKTAN*.Peneliti SOSIOLOGI di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Bogor. @yahoo.com syahyuti@gmail.com.
-